

Ketua DPR:

Yang Bilang Masyarakat Miskin 100 Juta, Tidak Benar

Uje Hartono - detikFinance

Jumat, 03 Agu 2018 15:28 WIB



Foto: Uje Hartono/detikcom

Banjarnegara - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan angka kemiskinan di Indonesia turun satu digit menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Dia juga menegaskan ada 100 juta masyarakat miskin di Indonesia itu tidak benar.

"Soal angka kemiskinan, data dari BPS menyampaikan jika saat ini sudah turun. Bahkan sekarang hanya satu digit. Jadi jika ada yang menyampaikan 100 juta masyarakat miskin itu tidak benar," ujar Bambang saat bertemu kader partai Golkar di Banjarnegara, Jawa Tengah, Jumat (3/8/2018).

Baca juga: SBY Sebut Ada 100 Juta Orang Miskin di Era Jokowi, Ini Kata Kemenkeu

Sebelumnya mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan masih ada 100 juta orang miskin di Indonesia. Di sisi lain, BPS mencatat pada Maret 2018 kemiskinan turun menjadi 9,82% lebih rendah dari September 2017 yang sebesar 10,12%.

Menurut Bambang turunnya angka kemiskinan di antaranya melalui program pemerintah seperti beras bantuan rakyat hingga banyaknya proyek infrastruktur.

Baca juga: SBY Sebut Warga Miskin Ada 100 Juta, JK: Data BPS Lebih Valid

"Dengan terbukanya lapangan pekerjaan tentu bisa mengurangi angka kemiskinan di

Indonesia," kata pria yang beken disapa Bamsuet itu.

Saat disinggung soal tenaga asing yang masuk ke Indonesia, politikus Partai Golkar ini mengatakan, proyek-proyek pemerintah yang sifatnya turnkey ini akan dibatasi atau dihilangkan, sehingga, mampu menyerap tenaga kerja dalam negeri.

Baca juga: [SBY dan Prabowo Punya Data Kemiskinan, Ekonom: Yang Diakui BPS](#)

"Jadi kalau mau memberi utang, ya utang saja. Kita bangun sendiri, sehingga kita bisa membeli barang-barang seperti semen atau besi dari dalam negeri," kata dia.

Ia tidak memungkiri jika selama ini ada beberapa proyek yang bersifat turnkey project. Menurutnya, hal ini merugikan baik dari sisi pengadaan barang atau tenaga kerja.

"Ada beberapa proyek yang sifatnya turnkey dan sudah terlanjur kita tunggu saja hasilnya. Tetapi kedepan kita batasi bahkan dihilangkan," tegasnya.(hns/hns)

Mensos:

Kemiskinan di Akhir Periode Jokowi 9%

Trio Hamdani - detikFinance

Jumat, 03 Agu 2018 17:54 WIB



Foto: Trio Hamdani/detikFinance

Jakarta - Pemerintah berupaya menekan lagi angka [kemiskinan](#) menjadi 9% di 2019 nanti. Sebelumnya [Badan Pusat Statistik \(BPS\)](#) mencatat Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka [kemiskinan](#) Maret 2018 9,82%, turun dari sebelumnya 10,12% pada September 2017.

Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham mengatakan pemerintah berkomitmen menekan angka kemiskinan menjadi 9% atau minimal 9,3%.

Baca juga: [Mensos Beberkan 3 Faktor Kemiskinan di Era Jokowi Single Digit](#)

"Maka kami proyeksikan kita bisa tekan kemiskinan di akhir periode Presiden Jokowi sampai 9-9,3%. Itu kita akan lihat," katanya Jumat (3/8/2018).

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) telah berkoordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terkait penyaluran bantuan tunai maupun non tunai. Juga berkoordinasi dengan Perum Bulog terkait bantuan beras.

Baca juga: [Ketua DPR: Yang Bilang Masyarakat Miskin 100 Juta, Tidak Benar](#)

"Dalam rangka capai target 9% atau 9,3%, maka kita sudah sepakat, secara bersamaan sama, Himbara siap semua seluruh kelembagaan jaringan perbankan yang ada. Bulog juga perbaiki kualitas beras, sudah ada langkah Bulog," ujarnya.

Kementerian/lembaga (k/l) juga terus bekerja sama agar program bantuan sosial efektif.

Baca juga: [Kisruh Data Kemiskinan, Bappenas: Sumber Cuma Satu dari BPS](#)

"Belum lagi kementerian lain, Kemendes, Kementan, KKP, Kementerian Agraria, ya dan lain lain secara bersama sama, (Kementerian) Kesehatan, Pendidikan," tambahnya.
(hns/hns)